

**PERS DALAM DEMOKRATISASI DI INDONESIA
(Kajian Tentang Peranan Pers Dalam Peristiwa Revolusi Mei 1998)**

Encep Solihutaufa

Email : hutaufaencep717@gmail.com

SMA Negeri 1 Simpenan Kab. Sukabumi

Abstract

The purpose of this paper is to find out how the role of the press in the May 1998 revolution and to find out the obstacles faced by the press in carrying out its role. This research is descriptive and literary in nature, by analyzing and describing the role of the press in the May 1998 revolution through books, journals, articles, documents and research results related to these events. The background for determining the topic of this research is considering the press as a social institution that has power in the political system and based on the author's observation that the press during the new order was always limited by the government's space for movement, in other words the government carried out strict control over the press, but in situations and circumstances Under such conditions, the press is still able to play a role in realizing democracy in Indonesia, especially in the events of the May 1998 revolution. The news that was critical during the May 1998 revolution presented by the press would undermine the legitimacy of the government regime. The press is also a means for the public to convey input into the political system. Thus, it is clear that the press has a significant role in the May 1998 revolution. The role of the press in democratization is as a means of change and as a means of control and criticism. When it comes to the May revolution, the role of the press as a means of change consists of the press as issues manager, delegitimizing the regime and as a social organizer. The obstacles experienced by the press in carrying out its role are the intervention or restraint of the government on the press and the excitement of the press by electronic media.

Keywords: Revolution, legitimacy, democratization

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pers dalam menjalankan peranannya tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan literatur, yakni dengan menganalisa dan menggambarkan peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 melalui buku-buku, jurnal, artikel, dokumen dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Latar belakang penetapan topik penelitian ini mengingat pers sebagai suatu lembaga sosial yang mempunyai kekuatan dalam sistem politik dan berdasarkan pengamatan penulis bahwa pers selama orde baru senantiasa dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah, dengan kata lain dilakukannya kontrol yang ketat oleh pemerintah terhadap pers, namun dalam situasi dan kondisi seperti itu pers tetap mampu berperan dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam peristiwa revolusi Mei 1998. Berita-berita yang kritis pada waktu revolusi Mei 1998 yang disajikan oleh pers akan menggerogoti legitimasi rezim pemerintahan. Pers juga menjadi sarana bagi masyarakat dalam menyampaikan input dalam sistem politik. Dengan demikian jelaslah bahwasanya pers mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam peristiwa revolusi Mei 1998. Peranan pers dalam demokratisasi adalah sebagai sarana perubahan dan sebagai sarana kontrol dan kritik. bila dikaitkan dengan peristiwa revolusi Mei, maka peranan pers sebagai sarana perubahan terdiri dari pers sebagai *issues manager*, sebagai *delegitimasi rezim* dan sebagai *social organizer*. Hambatan yang dialami oleh pers dalam menjalankan peranannya tersebut adalah adanya intervensi atau pengekangan pemerintah terhadap pers dan tersanginya pers oleh media elektronik.

Kata Kunci : Revolusi, legitimasi, demokratisasi

Submitted: 17-09-2022 | Accepted: 23-09-2022 | Published: 24-09-2022

1. Pendahuluan

Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya. Dengan kata lain dalam suatu negara demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ada banyak peranan yang dilakukan oleh pers dalam suatu negara dan dalam mewujudkan demokrasi. Namun, agar pers mampu menjalankan peranannya terutama dalam menunjang demokratisasi maka perlu adanya kebebasan pers dalam menjalankan tugas serta fungsinya secara professional. Media masa yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan negara dan dengan demikian adanya kendali atas negara oleh rakyat, sehingga menjamin hadirnya lembaga-lembaga politik yang demokratis sebagai

sarana yang paling efektif untuk menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu. Apabila negara mengendalikan media massa maka terhambatnya cara untuk memberitakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.

Bagi suatu pemerintahan diktator kebenaran merupakan bahaya baginya, sebab kebenaran akan membuka seluruh jaringan tipu dayanya. Berita-berita yang berasal dari foto jurnalisisme serta data dokumenter lainnya memang memiliki daya yang sangat kuat. Misi pertama pers dalam suatu masyarakat yang demokratis atau suatu masyarakat yang sedang berjuang untuk menjadi demokratis adalah melaporkan fakta. Misi ini tidak akan mudah dilaksanakan dalam suatu situasi ketidakadilan secara besar-besaran dan pembagian yang terpolarisasi. Terkucilnya prospek kebebasan pers jelas merupakan bagian dari redupnya prospek demokratisasi.

Diawal kekuasaannya, rezim pemerintahan orde baru menghadapi Indonesia yang traumatis. Suatu kondisi dimana kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya serta psikologis rakyat yang baru tertimpa prahara. Politik satu kata yang tepat ketika itu kemudian dijadikan formula orde baru, yakni pemulihan atau normalisasi secepatnya harus dilakukan, jika tidak kondisi bangsa akan kian berlarut-larut dalam ketidakpastian dan pembangunan nasional akan semakin tertunda.

Dalam sejarah demokratisasi di Indonesia, khususnya pada era orde baru yang mencapai puncaknya pada peristiwa revolusi Mei 1998 yang ditandai dengan berakhirnya rezim orde baru dan pengunduran diri presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, pers mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tentunya tidak terlepas dari kedala dan hambatan yang mereka alami karena rezim pemerintahan orde baru dikenal sebagai rezim pemerintahan yang otoriter yang memasung hak masyarakat untuk berbicara.

Diakui bahwa pers Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan reformasi atau revolusi pada tahun 1998, yang mencapai momen bersejarah dengan pengunduran diri Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun pada 21 Mei 1998. Meskipun pers bukanlah pelopor gerakan revolusi itu, sulit dibayangkan bahwa gerakan revolusi yang dipelopori mahasiswa itu akan terus bergulir tanpa pemberitaan dan dukungan gencar media di Indonesia seperti pers.

Beberapa waktu sebelum Soeharto lengser pada medio 1998 terjadi semacam *power facum*, dimana pihak pemilik perusahaan melepaskan diri dari intervensi yang dilakukan dalam memproduksi berita. Dalam kondisi semacam itu inisiatif hampir sepenuhnya ditangan jurnalis profesional. Seandainya para jurnalis sebagai aktor dengan kedudukan profesional yang signifikan disektor industri media tidak menagambil alih inisiatif untuk memproduksi teks pemberitaan seputar krisis dan mengemasnya sebagai teks yang melemahkan legitimasi rezim Orde Baru tentunya akan sulit struktur politik ditanah air bisa berubah dari struktur otoritarian menjadi struktur politik seperti yang ada saat sekarang ini.

Menurut hemat penulis upaya yang dilakukan oleh pers untuk mewujudkan demokrasi di tengah-tengah rezim pemerintah otoritarian yang senantiasa berusaha untuk mempertahankan kekuasaan merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Selain itu pers merupakan lembaga sosial yang secara ideal nya bersifat netral, tidak untuk kepentingan kelompok orang-orang tertentu melainkan untuk semua orang. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peranan pers dalam proses demokratisasi di Indonesia, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **Pers Dalam Demokratisasi di Indonesia, Kajian Tentang Peranan Pers Dalam Peristiwa Revolusi Mei 1998**”

2. Kerangka Pemikiran dan Teori

Ketentuan tentang penyelenggaraan pers di negara Kita diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1966. sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan maka Undang-Undang ini diperbarui dengan Undang-Undang nomor 04 tahun 1967 dan terakhir diperbarui dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1982.

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang dimaksud dengan pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waku terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat cetak lainnya.

Sesuai dengan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 yang diganti dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 maka istilah pers sebagai lembaga

kemasyarakatan alat revolusi yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 diganti dengan pers adalah lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional.

A. Muis menyatakan pers secara etimologis berasal dari bahasa Prancis "*preese*" berarti tekan atau cetak. dari bahasa Latin "*pressare*" dari kata "*premare*" definisi terminologinya media massa cetak disingkat media cetak. bahasa Belandannya drukpers atau pers yang diartikan sebagai surat kabar atau majalah.

Pers dalam rangka komunikasi politik dikaitkan dengan kebebasan pers, independensi pers terhadap kontrol yang berasal dari luar dan integrasi pers paa misi yang diembannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pers.

1. Tempat hidup dan berkembangnya media tersebut. Karena dalam masyarakat peranan itu bukan hanya abstrak tetapi harus konkret.
2. Komitmen pada kepentingan bersama yang harus sanggup mengatasi komitmen akan kepentingan dan pertimbangan kelompok bukan dalam suatu hubungan yang kontradiktif.
3. Visi dan *editorial policy*, yang akan membedakan media cetak yang satu dengan media cetak yang lain dan juga menjadi pedoman serta kriteria dalam proses menyeleksi kejadian-kejadian dan permasalahan untuk diliput dan dijadikan pemberitaan. (**Jacob Oetama, 2001 : 433**).

Selanjutnya Riswanda Imawan (**AIPI, 2002 : 47**) juga mengatakan bahwa demokratisasi muncul karena terjadinya kesenjangan yang makin melebar antara demokrasi formal dan demokrasi substansial yang dirasakan oleh masyarakat, makin sempitnya ruang partisipasi bagi masyarakat akibat pilihan pola dan strategi pembangunan nasional serta ada perilaku politik yang berinisiatif menyatakan kekuatan demokratik yang terpendam dalam masyarakat.

Sementara itu menurut Karl D Jackson kepolitikan Orde Baru ditandai oleh dimonopolinya kekuasaan dan partisipasi politik oleh level-level teratas dalam birokrasi sipil dan militer. Hal ini baik dalam supra struktur politik maupun infra struktur politik. Dalam tataran supra struktur politik level-level teratas dalam birokrasi relatif lebih dominan dibanding lembaga legislatif dan yudikatif. Dalam tingkatan infra struktur politik partisipasi politik dikendalikan oleh struktur birokrasi yang ada dalam tiap tingkatan pemerintahan sehingga tampak peran Negara lebih dominan dibanding dengan

inisiatif masyarakat. Sedangkan menurut R William Liddle partisipasi masyarakat pada era Orde Baru lebih banyak disebabkan oleh mobilisasi birokrasi Negara, baik birokrasi pusat maupun birokrasi lokal.

(Eep, 2000 : 51)

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat diatas terlihat bahwa kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dimasa Orde Baru disebabkan oleh tekanan, monopoli kekuasaan, mobilisasi, besarnya peranan militer dan intervensi Negara yang terlalu besar dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi, sehingga masyarakat mengalami krisis partisipasi politik yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan dianggap tidak sah dan tidak legalnya berbagai tuntutan serta tingkah laku politik masyarakat yang ingin berperan serta dalam proses politik dan pemerintahan.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu usaha mengumpulkan, menyusun, meng-interpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan keadaan situasi dan fenomena yang diselidiki. Dalam hal penelitian ini penulis menggambarkan dan menjelaskan peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998.

1. Sumber Data

Untuk melakukan sebuah penelitian terdapat tiga jenis data, yaitu data survei, data agregat dan data dokumenter yang masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Dari tiga jenis data tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu, data agregat dan data dokumenter sesuai dengan data yang ingin dicari.

Data agregat adalah data yang telah diolah oleh orang lain terutama peneliti yang penelitiannya telah dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel, jurnal-jurnal ilmiah dan sebagainya. Sedangkan data dokumenter adalah data dan bukti otentik dari sejarah yang berasal dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang telah teruji keabsahannya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah teknik telaah kepustakaan atau studi pustaka. Penulis akan mengumpulkan data dari buku, jurnal artikel dan hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan peranan pers dalam demokratisasi di Indonesia khususnya peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998.

3. Analisa Data

Metode analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Salah satu ciri penelitian dengan metode kualitatif adalah seringnya berubah-ubah desain penelitian tergantung perkembangan data yang akan dikumpulkan.

Dalam penelitian kualitatif para peneliti tidak mencari kebenaran (dalam arti teleologis) dan moralitas tetapi mencari pemahaman. Untuk itu dalam penelitian ini, data sekunder yang penulis dapat diinterpretasikan sesuai dengan penelitian ini dan data tersebut kemudian diolah dipilih serta diuji keobjektifitasannya melalui perbandingan data yang ada.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

REVOLUSI SEBAGAI UPAYA DEMOKRATISASI

Demokrasi dalam sebuah Negara otoriter tidak dengan mudah dapat dicapai hanya dengan proses pembangunan sosio ekonomi yang tersembunyi disuatu Negara yang membawanya kesuatu titik tertentu sehingga Negara tersebut lalu memiliki dengan begitu saja semua prasyarat penting untuk kehidupan yang demokratis. Demokrasi juga tidak dapat dicapai sebagai hasil dari pembagian, strategi, taktik dan negosiasi-negosiasi serta kesepakatan dari kelompok-kelompok elit yang saling bertentangan. Demokrasi dalam suatu Negara otoriter dapat dicapai melalui sebuah revolusi.

Revolusi untuk demokrasi bukan merupakan hasil usaha dan pengorbanan sekelompok orang-orang tertentu saja. Revolusi demokrasi adalah tumpukan pencapaian tujuan dari ratusan ribu bahkan jutaan rakyat dari berbagai kalangan yang secara aktif maupun pasif melibatkan diri dalam gerakan kemasyarakatan dan gerakan media yang independen. Dalam upaya revolusi demokrasi ini terdapat dua golongan masyarakat yang berperan serta dalam mewujudkan demokrasi tersebut. *Pertama*, yang disebut masyarakat beradab, yakni arena tempat terdapat banyak sekali gerakan sosial seperti persatuan atas dasar kekerabatan, perhimpunan wanita, kelompok agama, organisasi cendekiawan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan dari berbagai golongan serta kelompok profesi seperti persatuan sarjana hukum, persatuan wartawan, serikat pekerja dan lain sebagainya, yang mencoba membentuk diri mereka dalam suatu keteraturan supaya mereka dapat menyatakan dirinya dan menyalurkan kepentingan-kepentingannya. Dalam masyarakat beradab yang demikian, media masa yang otonom dan kehidupan budaya merupakan suatu dimensi penting lainnya yang harus ada demi mencapai tujuan

revolusi. Gerakan-gerakan lembaga-lembaga dan organisasi dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka kepada penguasa dan menyatakan aspirasi serta kepentingan-kepentingan mereka.

Kedua, masyarakat politik yakni arena tempat dimana para pelaku politik dan lembaga-lembaga politik bersaing untuk mendapat dukungan untuk menjadi pimpinan, menjadi penguasa Negara dalam seluruh aspek administratifnya, aspek birokrasi serta aspek hukum dan perundang-undangan yang bersifat memaksa dengan seluruh tingkat kewenangannya.

Suatu masyarakat beradab akan memberikan banyak sumbangan bagi revolusi untuk demokrasi. Diantaranya bahwa mereka akan menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan bahkan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan diantara pejabat Negara. Suatu rentetan asosiasi yang independen dan media yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan Negara dan dengan demikian adanya kendali atas Negara oleh rakyat serta akan menjamin hidirnya lembaga-lembaga politik yang demokratis sebagai sarana yang paling efektif untuk menjalankan pemerintahan dari rakyat itu. Selain itu masyarakat beradab atau juga yang dikenal dengan kelas menengah ini akan menjadi titik awal kehancuran dari rezim otoriter serta mempercepat berakhirnya rezim itu dari kekuasaannya. Hal ini terjadi karena aspek mencolok dari sistem pemerintahan yang otoriter salah satunya adalah bahwa sistem itu menghapus eksistensi masyarakat beradab, menempatkan semua bentuk organisasi dan pernyataan pendapat tentang pengawasan Negara. Yang pada akhirnya akan memunculkan gerakan bawah tanah atau pernyataan ketidakpuasan dari organisasi yang independen. Betapapun lemahnya gerakan bawah tanah ini namun menandai keretakan pertama dalam dominasi pemerintahan rezim otoriter yang suatu saat akan menjadi ledakan revolusi.

Katalisator dalam transformasi ini datang pertama-tama dari langkah-langkah sejumlah orang yang mulai mencoba-coba melewati batas-batas tindakan yang semula dilarang oleh rezim yang sedang berkuasa. Ini membawa mereka pada penemuan tujuan-tujuan bersama yang memiliki arti politik yang sangat signifikan karena hal itu diartikulasikan secara luas setelah periode panjang pelarangan, kesengsaraan dan penindasan. Dalam ruang politik yang genting pada tahap-tahap awal transisi ini, langkah-langkah perorangan tersebut secara mengesankan akhirnya berhasil memancing

atau menghidupkan kembali identifikasi-identifikasi dan tindakan-tindakan kolektif. Pada gilirannya ini turut menggalang kemunculan identifikasi yang luas yang mewadahi ledakan suatu masyarakat yang penuh kemarahan dan mengalami repolitisasi yang sangat intensif.

Tidak ada gambaran tunggal dari bentuk-bentuk ledakan ini. Ini bisa saja berupa munculnya kembali partai-partai politik lama atau pembentukan kembali partai-partai politik baru yang mendesakkan demokratisasi. Publikasi mendadak berbagai buku dan majalah-majalah mengenai tema-tema yang sudah sekian lama diberangus dan dianggap tabu oleh pemerintah, perubahan dalam institusi-institusi, asosiasi-asosiasi profesional, dan universitas-universitas dari peran mereka sebelumnya sebagai agen kontrol pemerintah yang terkekang menjadi sarana-sarana untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan harapan-harapan yang berlawanan dengan yang dipertahankan rezim.

Kelompok-kelompok yang berasal dari segmen penduduk yang agak berbeda justru mengambil keuntungan yang muncul secara cepat dalam proses liberalisasi. Mereka yang berada pada sektor yang diuntungkan yang menjadi salah satu pendukung bagi rezim dan yang setidak-tidaknya pada awalnya menerima hak-hak istimewa tiba pada kesimpulan bahwa rezim otoriter itu tidak diperlukan lagi. Mereka mungkin menganggap bahwa rezim telah mencapai tujuan-tujuan yang dicanangkan yakni apa yang mereka dambakan. Dengan mempertahankan rezim lebih lama dari jangka waktu yang diperlukan justru akan mengundang resiko terjadinya polarisasi sosial dan reaksi kekerasan massal. Ketika rezim tak lebih dari suatu manifestasi kegagalan kalangan ini mungkin merasa bahwa sudah tiba saatnya mencoba sesuatu yang lain.

Selain itu kalangan profesional bergaji dan independen mereka kerap kali berorganisasi dalam berbagai kalangan, kolega atau lembaga yang sebagian malah disponsori oleh pemerintah. Asosiasi-asosiasi pengacara, insinyur, arsitek, dokter, psikolog, wartawan dan pekerja sosial secara politik biasanya mereka memilih bungkam dan berorientasi untuk sekedar mempertahankan keuntungan-keuntungan hak-hak istimewa golongan. Tetapi dengan berlangsungnya keterbukaan dan informasi yang faktual dari media, sebagian dari mereka beralih menyuarakan isu-isu yang lebih luas. Seperti penghormatan pada hukum, pemurnian norma-norma profesional serta demokrasi. Mereka juga menegaskan bahwa pemenuhan tuntutan-tuntutan itu tergantung

pada demokratisasi kehidupan politik. Diskursus-diskursus mereka memiliki bobot ideologis yang kuat, sebab isu-isu tersebut dikemukakan oleh kalangan-kalangan yang mempunyai intelektualitas yang patut dihormati, karenanya digunakan untuk mengkritik rezim otoriter dan menuntut demokratisasi.

Dalam masa menjelang puncak perubahan atau revolusi sumber-sumber data, naskah-naskah, buku, esai-esai dan hasil-hasil penelitian yang memang sudah dipersiapkan sepanjang masa-masa represi tetapi tidak dapat atau tidak berani untuk diterbitkan, kini mulai bermunculan. Karya-karya ini melengkapi pernyataan-pernyataan yang dikemukakan asosiasi-asosiasi profesional dan partai-partai politik. Sebagian malah menjadi bacaan terlaris dan semua publikasi tersebut menjadi suntikan kehidupan baru dalam universitas, toko-toko buku, restoran dan tempat-tempat pertemuan lainnya, dimana diskusi-diskusi kritis kini ditolerir setidaknya-tidaknya secara *de facto* jika tidak secara *de jure*. Karenanya begitu langkah-langkah pertama menuju liberalisasi telah diayunkan dan sejumlah orang sudah berani mencoba melewati batas-batasnya, maka keseluruhan jaringan kepadatan dan kandungan diskursus kalangan otoritas intelektual akan berubah dan memberikan dorongan-dorongan untuk meruntuhkan pemerintahan otoriter.

Ketika masa transisi atau perubahan mulai berlangsung, organisasi-organisasi dan aktivis-aktivis hak-hak azasi manusia tampil dengan otoritas moral yang kuat. Ini menjadikan kritik mereka yang pedas terhadap rezim otoriter, dan akan memperoleh khalayak yang luas. Kritik yang mau tidak mau akan melebar dan mencakup hak-hak politik dan sosial yang hanya benar-benar dapat dijamin lewat demokrasi.

Tantangan terbesar bagi rezim dalam masa transisi atau perubahan mungkin muncul dari identitas-identitas baru atau yang hidup kembali dan kapasitas untuk melancarkan aksi bersama dari kelas buruh dan pekerja-pekerja rendahan yang sering kali tergabung dalam serikat buruh. Tidak mengherankan inilah wilayah dimana liberalisasi berkembang secara paling meragukan dan paling tidak tentu arahnya.

Seluruh perubahan ini terjadi secara cepat, tak terduga dan mencakup sebagian besar masyarakat sipil sehingga ini akan memperlemah usah-usaha rezim untuk melestarikan dan mempertahankan kekuasaannya.

Walaupun aksi-aksi ini muncul dari berbagai kalangan namaun pada dasarnya tuntutan mereka sama yakni terwujudnya pemerintahan yang lebih demokratis atau tuntutan akan adanya demokratisasi.

REVOLUSI MEI SEBUAH DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Revolusi adalah suatu perubahan dalam waktu relatif singkat dan tajam dalam siklus kekuasaan sosial. Ia tercermin dalam perubahan radikal terhadap proses pemerintahan yang berdaulat pada segenap kewenangan dan legitimasi resmi dan sekaligus perubahan radikal dalam konsepsi tatanan sosialnya. Dengan kata lain revolusi dapat diartikan sebagai suatu penjungkir balikan nilai-nilai, mitos, lembaga-lembaga politik, struktur sosial, struktur kepemimpinan serta aktivitas maupun kebijakan pemerintah yang telah dominan dalam masyarakat.

Setelah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, seluruh lapisan masyarakat Indonesia berduka dan marah. Terutama dari kalangan mahasiswa. Akibatnya peristiwa ini diikuti dengan peristiwa anarkis di Ibukota dan beberapa kota lainnya pada tanggal 13 - 14 Mei 1998 yang menimbulkan banyak korban baik jiwa maupun material.

Semua peristiwa tersebut semakin meyakinkan mahasiswa untuk menguatkan tuntutan pengunduran diri Soeharto dari kursi kepresidenan. Pilihan aksi kemudian yang dipilih oleh kebanyakan kelompok mahasiswa untuk mendorong turunnya Soeharto mengerucut pada aksi pendudukan gedung DPR.

Sebagai mana kita ketahui, selama 32 tahun berkuasa rezim militeristis Orde Baru telah dijalankan secara sistematis dengan menggunakan dua instrument politik, yaitu politik keamanan dan politik logistik. Dua instrument politik itu pada akhirnya melahirkan suatu masyarakat yang sangat pragmatis dan apolitis, yaitu masyarakat yang begitu lemah posisinya ketika dibandingkan dengan posisi Negara yang begitu kuat dan hegemonik.

Masyarakat yang lemah akan selalu terkalahkan bahkan sejak dari pertarungan wacana. Ada semacam pola lama dari rezim Orde Baru dalam melakukan manajemen konflik guna memenangkan pertarungan wacana diruang publik. Pertama rezim melakukan manipulasi informasi dan monopoli serta menguasai interpretasi makna atas setiap realitas. Kemudian berlandaskan interpretasi sepihak tersebut, rezim melakukan proses kriminalisasi atas setiap usaha dari masyarakat yang mencoba memberikan interpretasi sendiri. Tak heran jika label penjahat pengacau keamanan bahkan label ideology tertentu diberikan kepada siapa saja yang berani mengambil posisi bersebrangan

dengan rezim. Dengan cara itulah rezim menebar rasa takut dan tidak aman ditengah-tengah masyarakat kritis guna mendapatkan legitimasi atas setiap tindakan represif yang dilakukan atas nama dan untuk kepentingan rakyat.

Pada dasarnya telah berkali-kali dan dengancara yang damai serta teratur menurut hukum yang berlaku diusahakan oleh masyarakat untuk menciptakan iklim yang lebih demokratis dinegara ini, namun kekuatan yang mempertahankan status quo begitu kuat sehingga gerakan secara damai tidak mampu untuk mengusahakan perubahan yang diinginkan. Karena itu terpaksa digunakan kekuatan massal yang keras dengan menyimpang dari tatanan hukum yang melindungi kekuatan dan kekuasaan yang hendak bertahan.

Gerakan yang menumbangkan kekuasaan pemerintah dengan cara kekerasan dan melawan hukum oleh pihak yang hendak bertahan dinamakan makar. Sebaliknya gerakan itu oleh pihak yang menginginkan perubahan politik dan sosial dinamakan pembebasan dari kekuatan yang mendukung kesengsaraan rakyat atau revolusi.

Gerakan revolusi Mei yang sejak awal 1998 dilakukan oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia mempunyai tujuan dan sifat yang sama seperti gerakan-gerakan pendahulunya. Tujuan para mahasiswa adalah untuk menghentikan kekuatan politik dan sosial yang secara otoriter dan represif menyesakkan nafas hidup masyarakat.

Apabila tujuan itu tercapai maka para mahasiswa telah berhasil membuka jalan reformasi kearah tata hidup sosial yang bebas dan aman dibawah lingkungan hukum dan sistem ekonomi yang dapat menjamin kesejahteraan umum, dan pola politik yang benar-benar demokratis dalam arti berorientasi pada aspirasi dan kepentingan rakyat dengan pemerintah yang bersih dan berwibawa sebagai abdi masyarakat dan Negara.

Semula para mahasiswa dengan tertib menjalankan aksi didalam kampus masing-masing sambil dijaga oleh alat-alat keamanan Negara, polisi dan tentara di sekelilingnya. Tetapi oleh karena seruan-seruan para mahasiswa yang membawakan suara rakyat itu tidak diperhatikan oleh pemerintah, yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, maka dengan resiko jatuhnya korban mereka menjebol lingkaran polisi dan tentara bersenjata dan bergerak secara demonstratif di jalan-jalan dan lapangan umum dibawah simpati penuh dari masyarakat. Aksi yang menjadi gerakan itu dilakukan oleh para mahasiswa diseluruh Indonesia dan dalam kurun waktu yang sama. Dengan

demikian gerakan ini berkembang dari aksi lokal yang tersebar menjadi gerakan nasional yang massif dan dengan tujuan yang sama.

Pada awalnya tujuan itu secara sederhana dirumuskan dengan kata-kata Turunkan Harga, yaitu harga sembako (Sembilan Bahan Pokok). Yang naik dengan cepat sekali karena krisis moneter yang disusul dengan krisis ekonomi. Krisis moneter menjatuhkan nilai rupiah terhadap dollar Amerika sebagai mata uang ekonomi internasional dan dengan sendirinya menaikkan harga dari sembako dalam rupiah. Krisis ekonomi mengakibatkan ditutupnya banyak perusahaan bisnis dan di PHK kannya ratusan ribu karyawan yang menjadi penganggur tanpa sumber penghasilan untuk hidup.

Karena perjuangan mahasiswa ingin tetap sifat dan sikapnya sebagai kekuatan moral, maka usaha menurunkan Soeharto dari tahta kepresidenannya tidak dijalankan dengan kekerasan yang memungkinkan membawa pertumpahan darah. Para mahasiswa memilih jalan damai dan kalau dapat konstitusional. Jalan untuk itu adalah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Para pejuang senior, baik dari kalangan *civitas academica* maupun dari luar kampus yang selalu berjuang bersama para mahasiswa berganti-ganti membuat pernyataan yang memperkuat tujuan perjuangan para mahasiswa. Pernyataan-pernyataan itu disampaikan kepada DPR di Jakarta atau pada DPRD di daerah-daerah. Kalau mahasiswa tetap berdemonstrasi di jalan-jalan dan lapangan-lapangan untuk mengkomunikasikan maksud mereka secara langsung kepada rakyat, dan kalau pers di seluruh negeri setiap hari menyebarkan berita-berita perjuangan untuk dibaca oleh mereka yang tinggal di rumah atau di tempat kerja, maka organisasi-organisasi perjuangan senior boleh dikatakan setiap hari mertamu pada DPR untuk menyampaikan berbagai macam pernyataan.

Dalam suasana yang ultra panas ini terjadi suatu peristiwa yang meledakkan kemarahan para mahasiswa dan masyarakat terutama di Jakarta. Pada tanggal 12 Mei 1998 para mahasiswa Universitas Trisakti di kota Jakarta menjalankan demonstrasi tertib dan teratur dengan pengawalan alat-alat keamanan yang bersenjata. Setelah mereka berdemonstrasi maka mereka secara damai masuk kembali ke dalam kampus dan mempersiapkan diri untuk pulang. Sebagian para dosen dan mahasiswa sudah meninggalkan kampus dan sebagian lain bersiap-siap untuk pergi keluar. Pada waktu itu terdengar suara tembakan-tembakan dari barisan penjaga keamanan yang mengelilingi kampus. Lebih dari sepuluh mahasiswa terkena tembakan dan dengan kendaraan yang

ada mereka dilarikan kerumah sakit yang terdekat. Empat orang diantara mahasiswa meninggal ditempat di dalam kampus.

Peristiwa ini menimbulkan amarah seluruh rakyat Indonesia, terutama para mahasiswa yang jiwa perjuangannya sedang menyala-nyala. Rakyat Jakarta mengungkapkan rasa marah mereka dalam bentuk *riots*, yaitu aksi massa yang tak terkendali selama dua hari berturut-turut tanggal 14 dan 15 Mei 1998 di berbagai daerah dalam kota besar Jakarta. Selain atas dasar tersebut masyarakat menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan yang selama ini sulit didapatkan dikarenakan kesusahan ekonomi. Dengan beringas mereka merusak dan membakar gedung-gedung perkantoran, perniagaan dan merampok serta menjarah isinya. Selama dua hari itu alat-alat penegak keamanan tidak tampak bertindak di tempat-tempat kerusuhan.

Mahasiswa tidak pernah merusak membakar dan menjarah. Mereka meningkatkan perjuangan reformasinya yang khusus diarahkan pada DPR pusat. Mulai tanggal 18 Mei 1998 ratusan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan dari luar Jakarta siang malam menduduki gedung DPR dengan tuntutan agar DPR, setidaknya pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksinya memutuskan agar Soeharto lengser keprabon.

Presiden Soeharto berusaha untuk menentramkan suasana dengan kabinet baru yang menurut pandangan masyarakat sama sekali tidak berjiwa reformasi. Presiden Soeharto juga menawarkan dibentuknya sebuah komite reformasi nasional yang akan dipimpin oleh Soeharto sendiri, tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup menerima permintaan menjadi anggota. Bahkan sebaliknya ada sejumlah menteri yang menyampaikan pernyataan kepadanya untuk mengundurkan diri dari kabinet.

Para mahasiswa berhasil menekan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi mengambil keputusan agar Soeharto berhenti sebagai presiden Republik Indonesia. Keputusan ini disampaikan mereka bersama kepada presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara dan di depan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi, Soeharto menyatakan dirinya berhenti dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia.

Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto mahasiswa berharap dan beranggapan sistem pemerintahan akan berubah kearah yang lebih demokratis.

PERANAN PERS DALAM REVOLUSI MEI 1998

Dalam pencapaian masyarakat yang demokratis, tentu perlu ditunjang dengan sistem komunikasi politik yang baik. Sejalan dengan pembangunan nasional diharapkan pula pembangunan dalam bidang komunikasi, informasi dan media massa. Media massa yang dalam hal ini pers sudah barang tentu berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif secara menyeluruh, aspiratif dan meluaskan komunikasi serta partisipasi yang positif antara pemerintah dengan masyarakat.

Untuk mencapai fungsi pers Indonesia yang ideal seperti diatas tentunya sangat ditentukan oleh sistem politik suatu Negara. Sebab secara umum peranan pers yang dapat berfungsi dengan baik sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perpolitikan Negara yang bersangkutan. Semakin demokrasi suatu Negara maka semakin baik pula fungsi yang dapat dijalankan oleh pers, demikian juga sebaliknya. Apabila pers tidak dapat menjalankan fungsinya dikarenakan adanya tekanan dan hambatan yang diberikan oleh pemerintah suatu rezim, maka pers tersebut tentunya akan menjadi suatu bumerang yang akan menggerogoti legitimasi rezim tersebut.

Dalam menyajikan informasi atau berita, bagi pers yang berada dibawah tekanan pemerintahan yang otoriter dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit di satu sisi pers harus mengikuti keinginan pemerintah yang ingin mempertahankan legitimasi kekuasaannya, namun disisi lain pers harus menyajikan berita yang nyata atau faktual dan tuntutan pasar akan berita yang berbobot, objektif dan disukai oleh para pembaca.

Pada era Orde Baru aparat keamanan dan intelijen rezim Orde Baru telah sejak beberapa tahun anggaran sibuk meneliti gerak gerak wartawan dan bahkan sampai pada tahap menangkap beberapa orang diantara wartawan. Tidak demikian adanya dengan para pakar politik pemerhati Indonesia. Baru segelintir pakar yang menangkap potensi kelas menengah wartawan itu dalam kajian mereka mengenai prospek demokratisasi di Indonesia.

Analisis-analisis yang berusaha menjelaskan bagaimana rezim Orde Baru berakhir, pada umumnya juga terfokus pada peran yang telah dimainkan oleh gerakan mahasiswa, aksi berbagai kelompok politik, kerusuhan sosial, tekanan komunitas internasional dan krisis ekonomi yang terjadi menjelang revolusi Mei. Belum banyak yang secara signifikan

menyorot kontribusi media massa dan para wartawannya dalam proses politik yang mengakhiri rezim Orde Baru.

Ada sejumlah alasan mengapa media massa dan kelompok jurnalis memperoleh tempat marjinal dalam analisis-analisis seputar demokratisasi atau reformasi. Media massa didalam berbagai pendekatan cenderung diamati hanya sekedar medium bagi beroperasinya berbagai faktor pendorong demokratisasi. Bila pendekatan struktural menonjolkan peran kelas menengah sebagai kelompok yang mampu mendesak tuntutan demokratisasi dan pendekatan cultural menekankan kontribusi ide-ide demokrasi maka media massa hanyalah medium dimana tuntutan kelas menengah dan ide-ide demokrasi tersebut disampaikan kepada penguasa dan publik yang lebih luas.

Meskipun demikian, pengamatan terhadap perkembangan dari hari ke hari menjelang revolusi Mei memperlihatkan bahwa tanpa adanya peran aktif pers justru peran aksi-aksi mahasiswa, kerusuhan-kerusuhan sosial, krisis ekonomi, sikap para pemuka pendapat, kesalahan-kesalahan yang dilakukan sejumlah pejabat Orde Baru ataupun fragmentasi dikalangan elit penguasa, kesemuanya belum tentu bisa memperoleh bobot yang signifikan dalam mengerogoti legitimasi pemerintahan Soeharto. Para mahasiswa mungkin akan menjadi pejuang yang amat kesepian dan terisolir satu sama lain. Kerusuhan-kerusuhan sosial, perpecahan diantara para elit penguasa, pernyataan sejumlah tokoh oposisi yang menolak dicalonkannya kembali Soeharto sebagai presiden RI, tampilnya sejumlah guru besar Universitas Indonesia dan sejumlah perguruan tinggi ternama lainnya dalam aksi-aksi mahasiswa, semuanya bagi sebagian besar anggota masyarakat mungkin hanya kan beredar sebagai rumor.

Pada awalnya dalam proses penciptaan kondisi yang mendorong Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dari Jabatan Presiden bulan Mei 1998, media massa nasional memang bersikap amat berhati-hati. Bahkan banyak diantaranya yang bertiarap sampai pada titik yang membuat banyak anggota masyarakat sedemikian gemas, frustasi dan melarikan diri mencari berbagai media alternatif, mulai dari selebaran gelap, *web site*, media asing ataupun memburu informasi alternatif semacam rumor. Sekurang-kurangnya pada waktu awal-awal krisis tidak ada satu pun media massa yang cukup berani secara lugas mengolah topic-topik tertentu untuk menjadi komoditi informasi. Berbagai penilaian dan ulasan kritis seputar bisnis keluarga cendana, kepemimpinan Soeharto serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, perpecahan atau

fiksi dikalangan elit penguasa serta kontroversi seputar dwi fungsi ABRI merupakan area pemberitaan yang tabu yang sejauh mungkin dihindari media massa. Nasib yang menimpa Tempo, Detik dan Editor ketika era keterbukaan yang dianugerahkan Soeharto melalui pidato kenegaraan bulan Agustus 1990 tiba-tiba dicabut izin terbitnya bulan Juni 1994, agaknya hal ini telah membuat para jurnalis ditanah air semakin ketat menerapkan menghindar jauh-jauh dari topic-topik tabu. Keadaan ini terus berlanjut hingga menjelang awal revolusi Mei 1998.

Diantara sekian banyak topik yang dianggap tabu oleh pemerintah, maka kondisi dan peristiwa yang berkaitan dengan kepemimpinan Soeharto relatif paling banyak memuat elemen yang sensitif khususnya yang secara langsung bisa mengarah kepada gugatan terhadap legitimasi kepemimpinan Soeharto.

Beberapa bulan menjelang Soeharto mundur dari kursi presiden pada bulan Mei 1998, serangkaian pernyataan sikap menentang rezim Orde Baru yang secara lebih spesifik dan terbuka diarahkan kepada Soeharto sebenarnya telah sedemikian marak. Selama bulan Januari 1998 contohnya tercatat serangkaian aksi menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden RI untuk masa jabatan ke-7. beberapa diantaranya adalah yang dilakukan oleh sekelompok kecil aktivis militan dari pijar Indonesia yang pada tanggal 9 Januari 1998 di jalan Rasuna Said membenteng spanduk bertuliskan "*Presiden Baru, Badai Pasti Berlalu*", pernyataan 16 organisasi kepemudaan yang menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden. Kemudian tanggal 20 Januari 1998, 19 orang peneliti LIPI membuat pernyataan yang berbunyi "*...pengelola kekuasaan Negara telah gagal menjalankan amanat rakyat, oleh karena itu kami menganggap perlunya pergantian kepemimpinan nasional*". Beberapa hari kemudian, tanggal 22 Januari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta mendatangi gedung DPR untuk menyampaikan penolakan mereka terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden RI.

Upaya-upaya pengorganisasian isu yang dilakukan oleh pers pada peristiwa revolusi Mei 1998 tampak melalui berita-berita yang diterbitkan oleh pers. Pada awalnya isu yang diusung dalam aksi mahasiswa hanya terbatas pada turunkan harga, dikarenakan pada waktu itu harga sembako yang melambung tinggi sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi. Namun pada akhirnya secara berangsur-angsur diorganisir oleh pers melalui pemberitaannya menjadi turunkan Harto dan keluarga.

b. Pers Sebagai Agen Delegitimasi Kekuasaan

Media menempatkan diri sebagai agen delegitimasi kekuasaan rezim atau sebagai bagian dari mekanisme proses delegitimasi, yang berangsur-angsur menempatkan rezim Soeharto dalam posisi sebagai batu penghalang kearah demokrasi atau bagian dari masalah untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Peran itu dijalankan pers antara lain dengan meletakkan peristiwa atau kondisi tertentu dalam bingkai pemberitaan yang dapat mengguncang legitimasi rezim Soeharto. Contohnya dengan menyajikan realitas krisis ekonomi dalam bingkai krisis kepercayaan terhadap rezim Soeharto. Pemberitaan yang disajikan oleh pers tentang keadaan krisis ekonomi dan keadaan keamanan Negara disaat menjelang lengsernya Soeharto memberikan cerminan kepada masyarakat akan kelemahan pemerintah dalam menangani masalah yang secara tidak langsung akan melemahkan legitimasi rezim.

Nada, nuansa, ataupun kemasan pemberitaan media massa pada waktu menjelang puncak revolusi Mei memberikan kontribusi dalam proses delegitimasi rezim Soeharto. Salah satu usaha tersebut adalah antara lain bisa diamati melalui penampilan berbagai realitas simbolik tertentu yang dilakukan media massa. Sebagai contoh sederhana, pemberitaan sejumlah media massa yang menggambarkan keintiman hubungan Soeharto dengan pengusaha Bob Hasan ketika bermain golf, bisa dinilai sebagai suatu bingkai untuk memposisikan pembangunan ekonomi Orde Baru dalam citranya sebagai kroni kapitalis, yang dengan demikian bisa menurunkan legitimasi Soeharto sebagai negarawan dan tokoh sentral Orde Baru di mata rakyat.

Sebuah penampilan simbolik serupa juga dilakukan oleh majalah D&R, yakni yang sampul depannya menampilkan foto Soeharto dalam ilustrasi sebagai raja kartu kocok (D&R, edisi 11 Oktober 1998). Penampilan foto tersebut menggambarkan bahwa Soeharto tidak ubahnya laksana seorang raja yang memimpin Negara dengan kekuasaan penuh dan otoriter. Penampilan visual tersebut pada waktu itu oleh sejumlah Menteri pembantu Soeharto sempat dinilai sebagai penghinaan terhadap Kepala Negara dan dinilai pula sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa kita.

Majalah D&R yang selama beberapa kali penerbitan memberi porsi dan fokus khusus terhadap masalah penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi dan juga korban-korban mahasiswa yang mulai berjatuhan, merupakan salah satu diantara media cetak, yang pemberitaannya pada waktu itu sangat berpotensi membangkitkan anti-pati

terhadap aparat represif Orde Baru dan menggoyahkan legitimasi rezim itu dari segi moralitas politik.

Dalam bulan-bulan terakhir sebelum Soeharto turun dari jabatannya, sejumlah media massa nampak telah berhasil memanfaatkan momentum krisis moneter untuk memperlemah legitimasi rezim Orde Baru melalui bingkai pemberitaan mereka seputar krisis moneter. Sebagai contoh yang paling menonjol waktu itu adalah penggunaan metafor krisis kepercayaan dan jargon-jargon seperti transparansi KKN sebagai suatu *farming devices* dalam memberitakan kondisi dan peristiwa seputar krisis moneter ataupun dalam mengarahkan komentar dan analisis para pakar. Kata-kata krisis kepercayaan yang semula secara spesifik menunjuk pada goyahnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah, secara berangsur-angsur lebih merujuk pada pengertian krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru, terutama dalam kaitannya dengan sikap berbelit-belit yang diperlihatkan Soeharto dalam proses negosiasi dengan pihak IMF. Selain itu diterapkan pula *reasoning device* tertentu berupa logika kausalitas yang memfokuskan faktor-faktor politik dipihak penguasa sebagai penyebab krisis ekonomi.

Di samping itu media massa juga menampilkan realitas kamera dan grafis yang kontribusinya sulit diabaikan dalam proses delegitimasi Soeharto ataupun rezim Orde Baru. Satu diantaranya adalah sebuah foto yang diambil ketika Soeharto, 15 Januari 1998, menanda tangani *letter of intent* dengan disaksikan oleh Managing Director IMF, Michel Camdessus, yang ketika itu berdiri menyaksikan sambil melipat tangannya di dada. Adegan dalam foto tersebut, yang dimuat secara luas oleh media cetak dalam maupun luar negeri, memang dinilai mengesankan adegan seperti seorang guru yang sedang menghukum muridnya (Kompas, 15 Mei 1998).

Pada saat terjadinya kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota lainnya pers menampilkan berita-berita yang menggambarkan kondisi dan situasi kota Jakarta yang mencekam, masyarakat menjarah toko, pembakaran bahkan sampai pada perusakan fasilitas-fasilitas Negara. Hal tersebut mencerminkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pers menyebutkan dengan tulisannya bahwa kemarahan masyarakat tersebut terjadi karena sulitnya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berimbas pada naiknya harga barang. Pemberitaan-pemberitaan pers yang semacam ini menggambarkan bahwa legitimasi kekuasaan pemerintah mulai memudar dikalangan masyarakat.

Demikian juga dalam aksi-aksi mahasiswa, pers memberitakan bahwa ribuan mahasiswa melakukan demonstrasi setiap harinya pada minggu terakhir menjelang Soeharto mengundurkan diri. Pers menulis bahwa mahasiswa menuntut adanya perubahan dalam sistem penyelenggaraan Negara. Pemberitaan ini mencerminkan kepada masyarakat luas bahwa sebagian besar mahasiswa tidak lagi mempercayai pemerintah. Penembakan mahasiswa dalam tragedi di kampus Trisakti juga merupakan berita yang disajikan pers sebagai hantaman keras terhadap legitimasi pemerintah dimata rakyat. Peristiwa tersebut menggambarkan sikap represif aparat yang telah melanggar Hak Azasi Manusia.

c. Pers sebagai *social organizer*

pers juga mengambil peran sebagai *social organizer* dalam menggalang koordinasi gerakan reformasi dalam skala luas, baik yang meliputi koordinasi aksi dan tindakan ataupun isu-isu serta ide-ide pemikiran. Ini antara lain dilakukan melalui pemberitaan-pemberitaan aksi reformasi yang terjadi diberbagai tempat dan yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat. Isu-isu yang dikemukakan melalui aksi-aksi mahasiswa di satu kota, bisa digunakan oleh mahasiswa kelompok lain atau mahasiswa dari kota lain sebagai dasar merumuskan, menajamkan ataupun mengevaluasi relevansi isu-isu yang akan mereka tampilkan dalam aksi dikota atau kampus mereka sendiri.

Pemberitaan pers tentang demonstrasi disuatu wilayah yang disertai dengan rumusan tuntutan para demonstran tersebut, ketika dibaca oleh kelompok demonstran lain, mereka akan memakai rumusan tuntutan tersebut sebagai acuan untuk menentukan rumusan tuntutan mereka pula dan juga menjadikannya sebagai pengevaluasi tuntutan mereka selama ini, dimanakah tuntutan yang masih perlu dipertajam atau dipertegas.

Pers yang menampilkan berita melalui teknik wawancara terhadap mahasiswa dan tokoh prodemokrasi juga menampilkan perancangan aksi yang akan dilakukan selanjutnya sehingga perencanaan yang beritakan oleh pers mampu menjadi suatu pedoman bagi mahasiswa yang lain untuk melakukan aksi selanjutnya. Melalui pers juga para mahasiswa dapat mengajak dan memberikan pandangan tentang tujuantujuan aksi mereka sehingga mempengaruhi mahasiswa lainnya untuk ikut serta dalam aksi.

Pemberitaan yang disajikan oleh pers juga mampu menciptakan *sence of competition* di antara berbagai kelompok mahasiswa dan aktivis pro demokrasi dan juga menumbuhkan suatu dorongan untuk menjadi bagian pembuat sejarah melalui sajian

berita-berita yang rutin setiap harinya tentang eskalasi-eskalasi pro demokrasi yang terjadi.

Munculnya *sence of competition* bisa saja dideteksi melalui komentar-komentar mahasiswa ketika menyaksikan liputan pers. Misalnya pernyataan "masa kita kalah dengan UGM, lihat dong di Koran kemaren ribuan yang ikut". Sedangkan munculnya dorongan menjadi bagian dari pembuat sejarah, dengan melihat berita-berita dikoran mahasiswa menjadi merasa ingin kampus-kampus mereka tersebut sebagai bagian dari terjadinya peristiwa revolusi Mei.

5. Kesimpulan

. Peranan pers dalam gerakan revolusi Mei dapat digeneralisasikan dalam tema, bahwa kontribusi signifikan pers dalam memicu perubahan masyarakat seakan mengikuti teori klasik komunikasi massa yaitu teori serba media. Diasumsikan bahwa media massa termasuk pers mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi masyarakat, bukan saja dalam membentuk opini dan sikap tetapi juga dalam memicu terjadinya gerakan sosial.

Dalam peristiwa revolusi mei 1998, nampak jelas bahwa media massa tidak hanya memainkan peran pasif atau sekedar sebagai medium yang memberitakan peristiwa serta tidak hanya sekedar merefleksikan realitas sosial politik seputar aksi-aksi demokratisasi. Media massa atau pers secara aktif berperan serta mendefinisikan dan menciptakan realitas sosial politik yang berkaitan dengan peristiwa demokratisasi tersebut. Dalam garis besarnya, ada sejumlah peran aktif yang telah dijalankan oleh pers, khususnya dalam konteks aksi-aksi reformasi selama periode 1998 yang lalu ditanah air.

1. Pers Sebagai Sarana Perubahan

Salah satu dari peranan pers dalam demokratisasi adalah menjadi sarana perubahan melalui kemampuan komunikasi politiknya. Dalam peristiwa Revolusi Mei 1998 apabila dikaitkan dengan fungsi survailansi, interpretasi dan sosialisasi, maka pers mempunyai peranan sebagai berikut :

Pers Sebagai *Issues Manager*

Pers bisa diamati sebagai *issues manager* yakni mendefinisikan kondisi sosial politik yang ada dan menterjemahkannya menjadi isu-isu utama dalam agenda publik. Ini ditempuh antara lain melalui pemilihan peristiwa yang akan diberitakan, penentuan

sudut pemberitaan, penentuan figur-figur yang akan diwawancarai atau penentuan topik dan partisipan dalam rubrik serta opini baik yang didasarkan atas kaidah-kaidah profesi jurnalisisme atau idealisme para wartawan sendiri.

Pers Sebagai agen delegitimasi Kekuasaan

Media menempatkan diri sebagai agen delegitimasi kekuasaan rezim atau sebagai bagian dari mekanisme proses delegitimasi, yang berangsur-angsur menempatkan rezim Soeharto dalam posisi sebagai batu penghalang kearah demokrasi atau bagian dari masalah untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pers sebagai *social organizer*

pers juga mengambil peran sebagai *social organizer* dalam menggalang koordinasi gerakan reformasi dalam skala luas, baik yang meliputi koordinasi aksi dan tindakan ataupun isu-isu serta ide-ide pemikiran.

2. Pers Sebagai Alat Kontrol Politik

Dalam demokratisasi komunikasi politik merupakan hal yang sangat penting untuk mengontrol semua usaha dalam demokratisasi tersebut. Pers sebagai sarana komunikasi politik melalui fungsi surveilansi, interpretasi dan sosialisasi mampu menjadi sebagai sarana kritik dan kontrol bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga terciptanya sistem politik yang demokratis. Upaya kontrol dan kritik ini dapat dilakukan oleh pers melalui penyampaian opini-opini yang merupakan bagian dari pers.

Dalam menjalankan peranannya untuk menciptakan demokrasi di Indonesia khususnya dalam peristiwa revolusi Mei 1998, pers tidak terlepas dari hambatan yang dihadapinya hambatan tersebut adalah intervensi atau pengekan pemerintah terhadap pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 2003.
- Basuki, Wishnu. *Pers dan Penguasa*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*.
- Djuroto, Totok. *Penerbitan Pers Bandung*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2000.
- Efendi, Amran. *Bunga Rampai Peranan Pers Indonesia Dalam Laju Pembangunan*. Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Karya Generasi Muda Indonesia. Medan. 1983.
- Eisenstadt, S N. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. CV Rajawali. Jakarta. 1986

- Fatah, Eep Saefullah. *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2000.
- Hidayat, Dedy N. *Pers Dalam Revolusi Mei, Runtuhnya Sebuah hegemoni*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2000.
- Hoogerwerf, A. *Politikologi, Pengertian dan Problem-problemnya*. Erlangga. Jakarta. 1985.
- Imawan, Riswanda. *Desentralisasi, Demokrtaisasi dan Pembentukan Good Governance, Dalam Syamsudin Haris "Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. AIPi dan Pathnership For Governance Reform In Indonesia*. Jakarta. 2001.
- Indrawati, Srimulyani. *Kapitalisme Global dan Krisis Kepercayaan Terhadap Rezim Soeharto, dalam Pers Dalam Revolusi Mei, Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2000.
- Muis, A. *Titian Jalan Demokrasi, "Peranan Kebebasan Pers Untuk Budaya Komunikasi Politik"*. Kompas. Jakarta. 2000.
- Muis, A Dkk. *Humanisme dan Kebebasan Pers*. Kompas. Jakarta. 2001.
- Nimmo, Dan. *Komunikasi Khalayak dan Efek*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung. 2000.
- Oetama, Jakob. *Pers Indonesia, "Berkomunikasi Dalam Masyarakat Yang Tidak Tulus"*. Kompas. Jakarta. 2001.
- Pamungkas, Sri Bintang. *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*. Erlangga. Jakarta. 2001.
- Soemarjan, Selo. *Kisah Perjuangan Reformasi*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1999
- Suwardi, Harsono. *Peranan Pers Dalam Politik Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 1993.
- Sumono, Mustofa. *Kebebasan Pers Fungsional Sebagai Salah Satu Sarana Perjuangan Kemerdekaan di Indonesia*. Yayasan Idayu. Jakarta. 1978.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967.